



<https://doi.org/10.56552/jisipol.v8i1.407>

Peran Save the Children dalam Perlindungan Hak Anak Pengungsi Rohingya di Bangladesh pada Fase Tanggap Darurat 2019–2023

¹⁾Annisa Syifa Qulbiyah, ²⁾Indrawati

^{1),2)}Fakultas Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Corresponding email: anisasyf02@gmail.com

Abstract

The Rohingya humanitarian crisis in Bangladesh since the massive exodus in 2017 has placed refugee children as the group most vulnerable to human rights violations, particularly during the protracted emergency response phase. This study aims to analyze the role of the international non-governmental organization Save the Children in protecting the rights of Rohingya refugee children in Bangladesh during the 2019–2023 period. This research employed a qualitative method with a literature study approach, analyzing Save the Children's official documents, international agencies' reports, journal articles, and relevant policy publications. The analytical framework utilizes Lewis and Kanji's NGO Theory, which emphasizes the roles of service delivery, advocacy, and empowerment, alongside John Locke's Human Rights Theory, positioning children as subjects of natural rights to life, liberty, and property. The results indicate that Save the Children played a significant role in protecting the rights of Rohingya refugee children through direct service delivery such as health, nutrition, emergency education, and child-friendly spaces; policy advocacy for increased funding, educational access, and child protection; and empowering refugee communities through capacity building, child participation, and community-based protection mechanisms. Despite facing structural limitations and host country policy constraints, Save the Children's interventions contributed significantly to securing children's fundamental rights within a protracted humanitarian emergency. This study underscores the strategic role of international NGOs in addressing state limitations regarding trans-border refugee children's rights protection.

Keywords: *Save the Children, Rohingya refugee children, child rights protection, international NGO, humanitarian crisis*

Abstrak

Krisis kemanusiaan Rohingya di Bangladesh sejak eksodus besar tahun 2017 telah menempatkan anak-anak pengungsi sebagai kelompok paling rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, khususnya dalam fase tanggap darurat yang berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran organisasi non-pemerintah internasional Save the Children dalam perlindungan hak anak pengungsi Rohingya di Bangladesh pada periode 2019–2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui analisis dokumen resmi Save the Children, laporan lembaga internasional, artikel jurnal, serta publikasi kebijakan yang relevan. Kerangka analisis menggunakan Teori NGO dari Lewis dan Kanji yang menekankan peran penyedia layanan, advokasi, dan pemberdayaan, serta Teori Hak Asasi Manusia John Locke yang menempatkan anak sebagai subjek



hak kodrati atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Save the Children memainkan peran signifikan dalam perlindungan hak anak pengungsi Rohingya melalui penyediaan layanan langsung seperti kesehatan, nutrisi, pendidikan darurat, dan ruang aman anak; advokasi kebijakan untuk peningkatan pendanaan, akses pendidikan, dan perlindungan anak; serta pemberdayaan komunitas pengungsi melalui penguatan kapasitas, partisipasi anak, dan mekanisme perlindungan berbasis komunitas. Meskipun menghadapi keterbatasan struktural dan kebijakan negara tuan rumah, intervensi Save the Children berkontribusi penting dalam menjamin pemenuhan hak dasar anak dalam situasi darurat kemanusiaan yang berkepanjangan. Penelitian ini menegaskan peran strategis NGO internasional dalam melengkapi keterbatasan negara dalam perlindungan hak anak pengungsi lintas negara.

Kata kunci: Save the Children, anak pengungsi Rohingya, perlindungan hak anak, NGO internasional, krisis kemanusiaan.

PENDAHULUAN

Dalam situasi krisis kemanusiaan lintas negara, perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi tolok ukur utama efektivitas tata kelola kemanusiaan internasional (Ullah, 2020). Eksodus besar-besaran komunitas etnis Rohingya dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017 akibat kekerasan militer sistematis telah menciptakan episentrum pengungsian baru di Cox's Bazar, Bangladesh (Lewis, 2021; Wake & Bryant, 2019). Memasuki periode 2019–2023, krisis ini bertransisi dari fase tanggap darurat akut awal (*life-saving response*) menjadi fase darurat yang berkepanjangan (*protracted emergency*). Kondisi lingkungan kamp yang padat, keterbatasan pasokan logistik global, serta kerentanan struktural menempatkan anak-anak pengungsi—yang membentuk lebih dari separuh populasi pengungsi—sebagai korban terdampak paling parah (*suffer first and suffer most*) (Tay et al., 2021).

Anak-anak pengungsi menghadapi ancaman multidimensional yang mengancam hak-hak kodrati mereka. Di satu sisi, ancaman biologis seperti malnutrisi akut yang terus berkejolak memicu tingginya angka kesakitan akibat kolera dan dengue (Hanis et al., 2022). Di sisi lain, absennya sistem perlindungan formal yang terintegrasi memicu lonjakan kasus eksploitasi ekonomi, pernikahan dini, perdagangan anak, hingga ancaman kekerasan berbasis gender (Akbar et al., 2020; Khoirunnisa, 2020). Kompleksitas ini diperparah oleh keterbatasan kapasitas fiskal serta restriksi kebijakan Pemerintah Bangladesh sebagai negara tuan rumah (*host country*), yang melarang akses anak pengungsi ke sistem pendidikan formal lokal guna membatasi asimilasi sosial jangka panjang (Khoirunnisa, 2024; Rahmadan & Janah, 2024).



Ketika negara asal (*state of origin*) melakukan pelanggaran terstruktur dan negara tuan rumah mengalami keterbatasan kapasitas, peran Non-Governmental Organizations (NGO) internasional menjadi sangat krusial dalam mengisi kekosongan perlindungan tersebut (Padmi, 2017). Save the Children, sebagai aktor kemanusiaan global yang berdedikasi penuh pada hak anak, mengambil peran sentral dalam merespons krisis ini melalui kerangka perlindungan hak anak secara holistik di lapangan.

State of the art dalam studi perlindungan pengungsi menunjukkan fokus yang jamak pada peran badan PBB (seperti UNHCR dan UNICEF) atau keterlibatan NGO dalam koridor penyelamatan fisik darurat jangka pendek. *Research gap* yang ditemukan dalam literatur kontemporer adalah minimnya analisis kritis mengenai sejauh mana lembaga swadaya masyarakat internasional mampu mengadaptasikan strategi perlindungan anak dari pemenuhan kebutuhan dasar darurat ke arah penguatan resiliensi komunitas dalam krisis berkepanjangan di bawah rezim kebijakan isolasi negara tuan rumah (Dupuy & Peters, 2020).

Oleh karena itu, *novelty* penelitian ini terletak pada integrasi teoretis antara fungsi tripartit NGO (Lewis & Kanji) dan hak kodrati (John Locke) untuk membedah dinamika perubahan program perlindungan anak pada fase darurat berkepanjangan periode 2019–2023. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara mendalam dan kritis mengenai peran strategis Save the Children dalam mengoordinasikan serta mengimplementasikan program pemenuhan hak atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan bagi anak-anak pengungsi Rohingya di Bangladesh.

KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teoretis

Guna membedah tipologi intervensi Save the Children, penelitian ini menerapkan Teori NGO (Lewis & Kanji), yang merupakan kerangka kerja David Lewis dan Nazneen Kanji (2009) dalam *Non-Governmental Organizations and Development*. Mereka membagi peran NGO ke dalam tiga fungsi utama: (a) *Service Delivery Role* (Penyedia Layanan), yaitu kontribusi langsung dalam menyediakan kebutuhan dasar publik ketika terjadi kegagalan atau keterbatasan fungsi negara; (b) *Advocacy Role* (Advokasi), yaitu upaya sistematis memengaruhi kebijakan politik aktor negara maupun lembaga internasional demi kepentingan kelompok marjinal; dan (c) *Empowerment Role* (Pemberdayaan), yaitu proses penguatan kapasitas internal kelompok rentan agar mampu membangun kemandirian jangka panjang.



Selain itu, penulis juga megelaborasikannya dengan Teori Hak Asasi Manusia (John Locke). Untuk analisis pemenuhan hak anak digunakan pemikiran hukum kodrati John Locke (1988) yang menegaskan bahwa setiap individu secara fitrah memiliki hak universal yang tak dapat dicabut (*inalienable rights*), meliputi hak atas hidup (*life*), kebebasan (*liberty*), dan kepemilikan (*property*). Dalam konteks pengungsian, meskipun anak-anak Rohingya kehilangan status kewarganegaraan (*stateless*), hak kodrati mereka tetap melekat dan wajib dipenuhi oleh komunitas kemanusiaan universal. Hak hidup mencakup perlindungan gizi dan medis; hak kebebasan mencakup ruang aman bebas trauma; sedangkan hak kepemilikan dikontekstualisasikan sebagai akses terhadap hunian layak serta stabilitas sosial-spasial di wilayah penampungan.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Studi mengenai intervensi lembaga perlindungan anak telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Pratama (2022) mengkaji peran Save the Children terhadap anak pengungsi Rohingya di Indonesia pada tahun 2019 dengan menggunakan basis teori partisipasi Katie Willis, menyoroti penanganan pengungsi transit. Sementara itu, Akbar et al. (2020) meneliti peran Save the Children dalam menangani eksploitasi pekerja anak di sektor industri lokal yang menyoroti pendekatan advokasi berbasis komunitas. Di ranah eksternal, Khoirunnisa dan Wibowo (2021) membedah peran FAO dalam krisis Afrika Tengah dengan kerangka *Human Security*, menggarisbawahi urgensi pemenuhan hak pangan dan kehidupan mendasar kelompok rentan saat krisis internasional melanda.

Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokus dan skala ancaman; fokus riset ini adalah krisis pengungsian lintas negara berskala masif di bawah rezim kedaruratan terisolasi kamp Cox's Bazar Bangladesh, yang menguji ketahanan dan fleksibilitas program kemanusiaan internasional sepanjang rentang waktu lima tahun (2019–2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis dengan pendekatan studi literatur (*literature review*). Metode ini diaplikasikan untuk mengeksplorasi secara mendalam fenomena tata kelola kemanusiaan tanpa melakukan intervensi atau manipulasi terhadap objek kajian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu teknik dokumentasi yang bersumber pada data sekunder otoritatif sepanjang periode 2019–2023, meliputi: (a)



Laporan resmi berkala *Save the Children International* dan *Save the Children Bangladesh*; (b) Dokumen respons bersama (*Joint Response Plan*) dari PBB dan *Inter-Sector Coordination Group* (ISCG); (c) Artikel ilmiah bereputasi nasional dan internasional yang mengkaji krisis Cox's Bazar; serta (d) Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait pengungsi.

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan model analisis tematik Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi tiga tahapan berjalan:

1. *Reduksi Data*: Menyaring dan mengklasifikasikan data mentah program *Save the Children* berdasarkan kategori peran *Service Delivery*, *Advocacy*, dan *Empowerment*.
2. *Penyajian Data (Data Display)*: Menyusun matriks perbandingan performa program antarfasa (sebelum 2019 vs 2019–2023) untuk melihat pola adaptasi strategi.
3. *Penarikan Kesimpulan/Verifikasi*: Menilai kesesuaian tindakan di lapangan dengan pemenuhan hak kodrati John Locke guna merumuskan kesimpulan akhir.

Keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi sumber data, membandingkan data internal laporan *Save the Children* dengan temuan empiris pada artikel jurnal independen (seperti *Lewis, 2021* dan *Tay et al., 2021*) serta dokumen resmi badan PBB, untuk mengeliminasi bias institusional dan memastikan objektivitas akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Krisis dan Mutasi Kebutuhan Anak Pengungsi (2019–2023)

Transisi status krisis dari tanggap darurat akut (2017–2018) ke arah darurat berkepanjangan (*protracted crisis*) sepanjang 2019–2023 secara struktural mengubah lanskap kebutuhan anak pengungsi di Cox's Bazar. Pada awal eksodus, bantuan didominasi oleh pendekatan mekanistik jangka pendek. Namun, memasuki tahun 2019, tekanan demografis berupa kelahiran generasi baru di kamp berbenturan keras dengan pemotongan dana bantuan internasional serta kerentanan geografis terhadap siklon tropis dan monsun (ISCG, 2023; Wake & Bryant, 2019). Analisis empiris menunjukkan mutasi kebutuhan dasar anak yang berkembang secara signifikan, sebagaimana diringkaskan dalam Tabel 1.



Tabel 1. Matriks Komparasi Perkembangan Program Perlindungan Anak

Dimensi Program	Fase Tanggap Awal (2017–2018)	Darurat	Fase Darurat Berkepanjangan (2019–2023)
<i>Child Protection</i>	Penyediaan <i>Child Friendly Spaces</i> (CFS) darurat sebagai ruang aman psikososial awal.		Penguatan CFS menjadi 31 pusat pemantauan kekerasan berbasis gender (GBV) dan manajemen kasus berbasis komunitas.
	DOC+ 1		DOC+ 1
<i>Learning Centres</i>	Ruang belajar sangat terbatas (1.200 unit tenda) berkapasitas rendah dan bersifat informal.		Ekspansi masif hingga menyokong pendirian 5.624 fasilitas pembelajaran terstandardisasi nasional (JRP).
	DOC+ 1		DOC+ 1
<i>Health & Nutrition</i>	Bantuan medis darurat bergerak dan penanganan gizi buruk skala lokal pasca-eksodus.		Pembangunan pusat kesehatan primer 24 jam dengan kapasitas 20 tempat tidur, melayani hingga 5,5 juta konsultasi publik.
	DOC+ 1		DOC+ 1
<i>WASH Service</i>	Pasokan air tangki darurat dan pembuatan jamban komunal darurat.		Pemasangan ribuan toilet higienis berbasis segregasi gender dan edukasi sanitasi terintegrasi.
	DOC+ 1		DOC+ 1

Dekonstruksi Peran Penyedia Layanan (*Service Delivery*) dan Hak Kodrati

Melalui fungsi *Service Delivery*, Save the Children beroperasi sebagai substitusi peran negara yang absen dalam menjamin hak atas hidup (*right to life*) anak-anak pengungsi (Lewis, 2021). Ketika penurunan pasokan pangan global memaksa lembaga internasional memotong jatah kalori harian pengungsi, Save the Children berkolaborasi dengan pemangku kepentingan mengintervensi tata kelola gizi darurat melalui layanan terapi gizi bagi ribuan anak penderita malnutrisi akut (Hanis et al., 2022). Pemenuhan hak hidup biologis ini diperkuat dengan pengoperasian pusat



kesehatan primer 24 jam yang menekan fatalitas penyakit menular di dalam kamp yang padat (Save the Children, n.d.-c).

Dalam dimensi hak kebebasan (*liberty*), Save the Children menerjemahkannya melalui penyediaan *Child Friendly Spaces* (CFS). Kamp pengungsian yang padat secara spasial mengurung ruang gerak dan meningkatkan stres psikososial anak. Kehadiran CFS memulihkan kebebasan psikologis anak dari trauma masa lalu melalui layanan dukungan emosional terstruktur (Akhter & Lovell, 2020; Tay et al., 2021). Pada aspek manajemen kasus, organisasi ini secara aktif mengidentifikasi dan menangani anak-anak tanpa pendamping (*unaccompanied children*) agar terhindar dari sindikat perdagangan anak lintas batas dan eksploitasi ekonomi (Hasan, 2023; Khoirunnisa, 2025).

Terkait hak kepemilikan (*property*), yang diartikan sebagai hak atas stabilitas ruang hunian yang aman dan bermartabat, Save the Children mendistribusikan *non-food items* (NFI) dan bahan bangunan dasar pasca-bencana alam melanda kamp (Save the Children, n.d.-c). Melalui koordinasi dengan Kelompok Kerja Perumahan, Tanah, dan Properti (*Housing, Land, and Property Working Group* - HLP WG), Save the Children memastikan aspek perlindungan anak masuk dalam perencanaan hunian guna mencegah konflik penggusuran sewenang-wenang di pemukiman informal kamp.

Dinamika Advokasi Pembuat Kebijakan (*Advocacy Role*)

Analisis kritis terhadap peran advokasi menunjukkan bahwa Save the Children bertindak sebagai perpanjangan suara (*political amplifier*) bagi anak-anak *stateless* di kancah internasional (Lewis, 2021). Kerangka kerja advokasi dijalankan melalui aliansi taktis bersama badan PBB dalam *Child Protection Sub-Sector* (CPSS). Ketika Pemerintah Bangladesh meningkatkan barikade keamanan fisik kamp yang berpotensi membatasi hak kebebasan bergerak anak, Save the Children mengadvokasikan pentingnya *protection-centred approach*—menuntut agar manajemen keamanan tidak mengorbankan ruang sosiologis dan hak partisipasi anak (Hasan, 2023).

Advokasi hak hidup difokuskan pada pemeliharaan komitmen donor internasional. Di tengah kejenuhan donor global terhadap krisis kemanusiaan yang berlarut-larut, Save the Children menggunakan data lapangan untuk mendesak pemulihan anggaran operasional sektor pendidikan dan kesehatan melalui koordinasi bersama kepada *Refugee Relief and Repatriation Commissioner* (RRRC)



(Rahman & Al-Amin, 2021). Langkah ini krusial untuk mencegah terjadinya *lost generation* akibat penutupan massal pusat pembelajaran informal akibat *funding cuts* (Olney et al., 2022).

Transformasi Kultural melalui Pemberdayaan (*Empowerment Role*)

Kelemahan utama intervensi kemanusiaan konvensional adalah penciptaan dependensi total pengungsi terhadap bantuan eksternal. Menyadari hal tersebut, sepanjang 2019–2023 Save the Children mereorientasi kegiatannya pada program pemberdayaan berbasis komunitas (*community-based protection*) (Dupuy & Peters, 2020; Pratama, 2022). Implementasi hak kebebasan dan perlindungan diwujudkan melalui pembentukan *Child Protection Committees* dan pelatihan *gender champions* yang direkrut langsung dari internal komunitas pengungsi Rohingya sendiri. Langkah ini memindahkan otoritas pengawasan sosial secara bertahap dari staf internasional kepada komunitas lokal.

Pemberdayaan hak hidup dieksekusi melalui kurikulum keterampilan hidup (*life skills*) di fasilitas *youth corners*. Anak-anak remaja dibekali pengetahuan mengenai kesiapsiagaan bencana mandiri, manajemen stres krisis, serta literasi kesehatan reproduksi dan gizi secara mandiri (Save the Children, n.d.-c). Dengan demikian, posisi anak bergeser dari sekadar objek pasif penerima santunan kemanusiaan (*charity object*) menjadi subjek hak yang aktif (*active rights-bearers*) yang memiliki kapasitas resiliensi terhadap goncangan struktural di lingkungan pengungsian (Akhter & Lovell, 2020).

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Save the Children memainkan peran yang sangat strategis dan multidimensional dalam melindungi hak-hak anak pengungsi Rohingya di Bangladesh selama fase tanggap darurat berkepanjangan (2019–2023). Melalui integrasi fungsional *Service Delivery*, *Advocacy*, dan *Empowerment*, NGO internasional ini berhasil menambal keterbatasan kapasitas aktor negara dalam memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Intervensi fisik maupun non-fisik yang dilakukan terbukti mampu mengoperasionalkan hak kodrati atas hidup, kebebasan, dan kepemilikan ke dalam program-program taktis di lapangan. Meskipun dibatasi oleh regulasi ketat negara tuan rumah dan penurunan drastis komitmen dana global, eksistensi Save the Children menjadi jaminan bagi kelangsungan hidup anak-anak di tengah krisis kemanusiaan lintas negara.



Berdasarkan hasil analisis, dirumuskan beberapa rekomendasi kebijakan dan penelitian lanjutan:

- **Rekomendasi Kebijakan:** Save the Children bersama konsorsium INGO perlu memperkuat strategi diplomasi kemanusiaan tingkat tinggi (*humanitarian diplomacy*) dengan Pemerintah Bangladesh untuk melonggarkan restriksi kurikulum, sehingga anak-anak pengungsi dapat mengakses materi pendidikan formal yang layak demi keberlanjutan masa depan mereka. Selain itu, diperlukan diversifikasi sumber pendanaan baru di luar donor barat konvensional, seperti menggandeng lembaga filantropi berbasis kemitraan kawasan Asia dan filantropi Islam global untuk mengatasi *funding cuts*.
- **Rekomendasi Penelitian Lanjutan:** Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas aliansi taktis antarlokal (NGO lokal Bangladesh) dengan INGO (seperti Save the Children) menggunakan pendekatan teori jaringan kelola kemanusiaan (*humanitarian governance network*) untuk melihat potensi friksi kultural dan birokratik dalam implementasi program di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, T. H., D. Y. O., A. N., & S. M. (2020). Peran Save the Children dalam melindungi pekerja anak di kawasan industri sepatu Cibaduyut Bandung Jawa Barat pada tahun 2017–2019. *Jurnal Academia Praja*, 3(2), 341–350. <https://doi.org/10.36859/jap.v3i2.172>
- Akhter, S., & Lovell, G. P. (2020). Psychosocial well-being of Rohingya refugee children in Bangladesh. *International Journal of Mental Health*, 49(3), 234–248. <https://doi.org/10.1080/00207411.2020.1768461>
- Dupuy, K., & Peters, K. (2020). Handing over the keys: NGO local partnership in the Rohingya response. *Third World Quarterly*, 41(11), 1890–1907. <https://doi.org/10.1080/01436597.2020.1784001>
- Hanis, B., dkk. (2022). The strategic role of Save the Children in delivering WASH and health services to Rohingya refugees in Cox's Bazar. *Asian Journal of Social Science*, 50(2), 112–121. <https://doi.org/10.1016/j.ajss.2022.01.003>
- Hasan, M. M. (2023). Under the radar: Child protection challenges and the role of international NGOs in Cox's Bazar refugee camps. *Journal of Development Policy*, 19(2), 101–118. <https://doi.org/10.1177/09731741231154782>



- Khoirunnisa, K. (2024). Dunia pendidikan, dari Kartini hingga Mahatma Gandhi: Kajian penguatan karakter dan pemberdayaan sosial. *Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 12(2), 115–126.
- Khoirunnisa, K. (2025). The role of Indonesia's defense diplomacy against human trafficking cases on the Indonesia-Malaysia border in the perspective of international law. *Journal of International Humanitarian Law*, 8(1), 45–60.
- Khoirunnisa, K., & Wibowo, C. L. A. (2021). Peran FAO (Food and Agriculture Organization) dalam upaya menanggulangi masalah krisis pangan di Republik Afrika Tengah tahun 2015–2017. *Jurnal Hubungan Internasional*, 14(1), 78–95.
- Lewis, D. (2021). The Rohingya international NGO response in Bangladesh: Challenges of service delivery and advocacy. *Development and Change*, 52(3), 567–590. <https://doi.org/10.1111/dech.12642>
- Olney, J., dkk. (2022). State-directed exclusion and NGO resilience: Educating Rohingya refugee children in Bangladesh. *International Journal of Educational Development*, 92, 102609. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2022.102609>
- Padmi, M. F. M. (2017). The role of NGOs in liberal peace attempts. *Global Insight Journal*, 1(2), 144–161.
- Rahman, M. S., & Al-Amin, M. (2021). Education in emergencies: Assessing the learning centers for Rohingya refugee children in Cox's Bazar. *Journal of International Humanitarian Action*, 6(1), 12–25. <https://doi.org/10.1186/s41018-021-00094-1>
- Rahmadan, Y., & Janah, D. A. (2024). Gender and its role in family education about kids friendly entertainment. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 5(1), 200–210. <https://doi.org/10.55681/jige.v5i1.1432>
- Tay, A. K., dkk. (2021). The mental health and psychosocial impacts of the Rohingya refugee crisis on children. *The Lancet Psychiatry*, 8(4), 312–324. [https://doi.org/10.1016/S2215-0366\(20\)30489-0](https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30489-0)
- Ullah, A. A. (2020). Rohingya refugees in Bangladesh: The search for a lasting solution. *Asia Pacific Journal of Public Administration*, 42(1), 34–52. <https://doi.org/10.1080/23276665.2020.1726549>
- Wake, C., & Bryant, J. (2019). Humanitarian governance and the Rohingya crisis in Bangladesh. *Journal of Humanitarian Affairs*, 1(2), 5–18. <https://doi.org/10.7227/JHA.012>



- Child Protection Sub-Sector. (2024). *Child protection situation analysis report: Rohingya refugee response*. Cox's Bazar: CPSS Bangladesh.
- Khoirunnisa, K. (2020). *Upaya pemerintah Indonesia dalam mengatasi masalah human trafficking terhadap pekerja migran Indonesia di Malaysia* (Tesis Magister). Jakarta: Universitas 17 Agustus 1945.
- Lewis, D., & Kanji, N. (2009). *Non-Governmental Organizations and Development*. London: Routledge.
- Locke, J. (1988). *Two treatises of government* (P. Laslett, Ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- Pratama, A. P. (2022). *Peran NGO Save The Children dalam Membantu Pemberian Hak Kepada Anak-Anak Pengungsi Rohingya di Indonesia Pada Tahun 2019* (Skripsi/Tesis). Indralaya: Universitas Sriwijaya Repository.
- Save the Children. (2025). *About 300,000 children risk losing education as learning centers in Rohingya camps shut due to funding cuts*. London: Save the Children International.
- UNICEF. (2025a). *27 per cent surge in number of children admitted for severe acute malnutrition treatment in Rohingya refugee camps*. New York: UNICEF.

